

Wabup akan Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana akan melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait konflik mutasi dan rotasi puluhan ASN. Merespons hal itu, Subandi merespons dengan santai.

"Terkait dilaporkan ke Mendagri, nggak apa-apa, silakan," kata Subandi saat ditemui wartawan di sela-sela pemberian sambutan di acara Launching Komisi Inovasi Sidoarjo (KIS) tahun 2025 di pendopo Sidoarjo, Senin (22/9/2025).

Ia menegaskan mutasi ter-

hadap 61 pejabat ASN yang digelar pada Rabu (17/9) sudah sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Yang penting mutasi ini sudah sesuai dengan regulasi melalui sistem terbaru, ada sistem IMUD, ada sistem manajemen.

Semua sudah kita lakukan sesuai aturan," imbuh Subandi. Subandi menyebutkan mutasi dan rotasi pejabat dilakukan transparan, tanpa praktik jual beli, bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan izin pelantikan sehingga prosesnya dinilai sah.



Bupati Sidoarjo, Subandi.

"TPK sudah berjalan, PPK juga sudah berjalan, dan dari BKN dinyatakan pelantikan ini sudah diizinkan. Kalau sudah diizinkan berarti bisa kita lakukan. Jadi tidak ada masalah," tegasnya.

Potensi itu semakin menguatkan konflik antara Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan Bupati Subandi semakin panas. Konflik terjadi lantaran Mimik mengaku tak dilibatkan dalam mutasi dan rotasi aparat sipil negara (ASN). Mimik berniat melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu, sebanyak 61 ASN dimutasi dan dirotasi, dari pejabat tinggi hingga pejabat administrasi. Padahal, menurut Mimik, sebelumnya telah disepakati bahwa pergeseran hanya untuk mengisi 31 jabatan yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya sangat menyayangkan karena kesepakatan awal hanya untuk 31 ASN, tapi tiba-tiba jumlahnya menjadi 61 orang. Penambahan itu tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku tim pengarah dalam TPK (Tim Penilai Kinerja)," ujar

Mimik, Minggu (21/9/2025).

Mimik menegaskan mutasi tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit. Ia mengatakan akan melaporkan hal ini ke Kemendagri.

"Jelas ada pelanggaran mekanisme. Saya tidak mengetahui prosesnya, bahkan saat pelantikan berlangsung. Karena itu, saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri agar sistem di Sidoarjo diturunkan kembali," tegasnya. (md/rus)

Pemkab Beri Penghargaan Insan di Ajang Anugerah Jurnalistik

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemkab Sidoarjo kembali memberikan penghargaan kepada insan jurnalis dan kreator konten. Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Jurnalistik Sidoarjo 2025 yang juga dibarengi dengan kegiatan Talk Show Sidoarjo Heritage Talks di pendopo Delta Wibawa, Rabu, (24/9). Sebelumnya Dinas Kominfo Sidoarjo menggelar lomba karya tulis, fotografi dan video dengan mengangkat tema "Sidoarjo Heritage Writing, Photo, And Vlog/Video Competition". Telah terpilih 12 pemenang dari seluruh kategori lomba. Mereka mendapatkan piagam penghargaan, trophy juara serta uang tunai. Hadiah tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Sidoarjo Muhammad Mahmud serta Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Sidoarjo Muhammad Mahmud yang hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam



Anugerah Jurnalistik Sidoarjo tahun ini. Kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah dapat diwujudkan lewat kegiatan seperti ini. Karya tulis, fotografi serta video yang dibuat insan jurnalis dan kreator konten dapat menjadi media untuk memperkenalkan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah yang memiliki identitas kuat, berdaya saing, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia pun berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat, Sidoarjo dapat terus dilakukan melalui kegiatan tersebut.

"Saya ucapkan selamat kepada para pemenang Anugerah Jurnalistik Sidoarjo tahun 2025. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya berinovasi, dan memberi inspirasi bagi

masyarakat," ucapnya.

Muhammad Mahmud mengatakan tema "Sidoarjo Heritage Writing, Photo, And Vlog/Video Competition" dalam Anugerah Jurnalistik Sidoarjo 2025 sangat relevan di era digital saat ini. Pasalnya gempuran budaya asing melalui Media Sosial/ Medsos sudah sangat masif. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan promosi digital tentang sejarah, tradisi, serta budaya sendiri. Dikatakannya Kabupaten Sidoarjo memiliki kekayaan sejarah, tradisi, serta budaya yang patut dijaga dan dilestarikan.

"Karya jurnalistik, foto, maupun video yang lahir dari kompetisi ini akan menjadi jejak penting bagi promosi daerah, peningkatan literasi publik, dan pemertanian

citra positif Sidoarjo di mata masyarakat luas," ucapnya.

Sementara itu Sekdin Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan Anugerah Jurnalistik Sidoarjo rutin digelar setiap tahun. Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada insan pers dan masyarakat umum yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan informasi, menggali potensi, serta mempromosikan Kabupaten Sidoarjo. Dipilihnya tema "Sidoarjo Heritage Writing, Photo, and Vlog/Video Competition" untuk menggugah semangat generasi muda, para jurnalis, dan kreator konten agar terus melestarikan warisan budaya, sejarah, dan tradisi yang dimiliki Sidoarjo.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat melahirkan karya-karya terbaik

yang tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga mampu memperkenalkan Sidoarjo secara lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional," ucapnya.

Ia menyampaikan rangkaian kegiatan Anugerah Jurnalistik Sidoarjo telah dimulai sejak 23 Juli sampai 31 Agustus 2025. Jumlah pesertanya mencapai 78 dengan karya yang masuk meliputi kategori writing, photo, dan vlog/video. Seluruh karya telah melalui proses penilaian oleh dewan juri yang kompeten di bidang jurnalistik, fotografi, dan konten kreatif. Ia berharap kegiatan seperti ini mampu menggerakkan komunitas vlogger, fotografi, dan jurnalis di Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan karya-karya yang berbobot dan berkualitas.

"Salah satu tujuan kegiatan Awarding Anugerah Jurnalistik Sidoarjo tahun 2025 adalah untuk mendokumentasikan warisan sejarah dan budaya Sidoarjo dalam bentuk karya ilmiah, karya foto dan video/vlog. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian heritage local," ucapnya. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOETI/DUTA

Pelatihan Kader Posyandu ILP PKM Gedangan di Aula PKM Gedangan, Kamis (25/9/25)

Perkuat 25 Kompetensi Layanan Kesehatan

SIDOARJO - Puskesmas Gedangan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menggelar Pelatihan Kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), Rabu-Kamis (25-26/9), di Aula Puskesmas Gedangan. Kegiatan ini diikuti oleh 45 kader terpilih dari tujuh desa wilayah binaan Puskesmas Gedangan.

Kepala Puskesmas Gedangan, dr. B. Irawatyratna, K.M.M. menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader agar mampu memberikan layanan kesehatan yang komprehensif.

"Ada 25 kompetensi yang dilatihkan, mulai dari keterampilan pengelolaan Posyandu, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga deteksi dini penyakit pada usia dewasa dan lansia. Kami ingin kader memiliki keterampilan yang menyeluruh untuk mendukung ILP," terangnya.

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari dengan menghadirkan tiga narasumber terlatih, yaitu satu petugas promkes dan dua bidan.

Metode pembelajaran memadukan teori dan praktik, sehingga kader bisa langsung mempraktikkan keterampilan yang diajarkan.

Adapun kompetensi utama yang dilatihkan meliputi, Pengelolaan Posyandu: menjelaskan paket layanan sepanjang siklus hidup, pencatatan dan pelaporan, kunjungan rumah, serta komunikasi efektif.

Kesehatan Bayi dan Balita: pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, deteksi dini masalah kesehatan. Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui: edukasi pentingnya ASI eksklusif dan pemantauan kesehatan ibu. Usia Sekolah dan Remaja: pencegahan anemia, edukasi bahaya merokok dan NAPZA. Usia Dewasa dan Lansia fokus deteksi dini hipertensi, diabetes, serta penyuluhan GERMAS (isi piringku dan aktifitas fisik)

Menurut dr. Ira sapaan akrabnya menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat peran kader

Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar," tegasnya.

"Semangat para kader dalam menyimak materi pelatihan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Kami berharap sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ini membawa keberkahan, khususnya bagi masyarakat wilayah Puskesmas Gedangan," pungkasnya.

Terpisah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Laksmie Herawati Yuwantina, M.Kes. kepada Duta Masyarakat (duta.co) mengatakan, tujuan dan harapan pelatihan kader posyandu Integritas Layanan Primer (ILP) adalah: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Membekali kader dengan keterampilan dasar kesehatan.

Selain itu mendukung program Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk mendekatkan akses layanan kesehatan yang dilaksanakan di seluruh Puskesmas," terang Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo tersebut. • Loe

DUTA

Wabup ajak Warga Maksimalkan Layanan Adminduk Jemput Bola

SIDOARJO - Warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, kini bisa lebih mudah mengurus dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo menghadirkan layanan jemput bola terpadu di Balai Desa Mergosari, Rabu sore (24/9/25). Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, hadir langsung meninjau sekaligus memberi apresiasi atas program ini.

Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma, Camat Tarik, Kepala Desa Mergosari Eko Budi Santoso, jajaran Forkopimka Tarik, serta anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Saifuddin Afandi dan Bambang Riyoko.

Mimik Idayana menegaskan pentingnya pelayanan cepat, mudah, dan gratis. "Layanan jemput bola seperti ini adalah komitmen Pemkab Sidoarjo untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak perlu jauh ke kecamatan atau MPP, semua bisa diurus di sini," ujarnya.

Wabup juga mengingatkan warga agar segera melapor jika menemukan pungutan liar dalam proses pelayanan.

Layanan terpadu tersebut meliputi pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, KTP, hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Desa Mergosari, Eko Budi Santoso, menyambut baik program ini. "Sangat membantu warga kami yang terkendala jarak dan waktu. Semoga bisa rutin digelar," katanya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang hadir. Banyak yang mengaku terbantu karena prosesnya cepat dan hemat biaya. "Sangat praktis, tadi saya urus akta kelahiran anak, langsung selesai," ungkap salah satu warga.

Terpisah Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Drs. Reddy Kusuma, M.A, kepada duta.co Kamis (25/9/25) menyampaikan, "Jebete layanan Adminduk di Desa Mergosari maupun desa-desa lainnya kita laksanakan setiap minggu sebagai komitmen Pemkab Sidoarjo, khususnya Dispendukcapil, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan sejak lahir hingga meninggal.

"Layanan Jebete ini langsung jadi, meliputi paket akta kelahiran (3 dokumen), paket akta kematian (3 dokumen), paket pindah (2 dokumen), serta layanan update KK, KIA, KTP digital, dan cetak KTP elektronik. Yang paling penting, semua layanan Dukcapil diberikan gratis tanpa dipungut biaya," tegas Reddy Kusuma. ● Loe



Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana didampingi Kepala Dispendukcapil Drs. Reddy Kusuma tinjau layanan jemput bola adminduk Desa Mergosari Kec. Tarik

LOETFI/DUTA

Soal Mutasi 61 ASN

Wabup Mimik Resmi Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana resmi melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mimik, yang merupakan bagian dari Tim Penilai Kinerja (TPK), merasa keberatan tidak dilibatkan dalam proses mutasi 61 ASN.

Surat laporan resmi dilayangkan ke Kemendagri pada Rabu (24/9/2025) malam. Dalam surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 itu, Mimik meminta Kemendagri turun tangan mengevaluasi kebijakan mutasi yang dianggap menyimpang dari kesepakatan awal.

“Surat laporan tentang mutasi ASN di Sidoarjo ini sudah kami kirim pada 24 September 2025 ke Kemendagri di Jakarta. Surat itu bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025,” kata tenaga ahli Wakil Bupati nonbujeting, Sigit Imam Basuki,

Rabu (24/9/2025).

Mutasi yang dilakukan di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (17/9) itu melibatkan 61 ASN, mulai pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat administrasi. Jumlah itu dinilai berlebihan karena awalnya hanya disepakati untuk mengisi 36 jabatan kosong di organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang disepakati hanya mengisi posisi kosong di 36 OPD. Tapi yang dimutasi sampai 61 orang. Ini jelas melampaui kewenangan yang seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dalam laporannya, Wakil Bupati meminta Kemendagri melakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan mutasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menasihatkan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi ASN berjalan sesuai dengan aturan perun-



Subandi Mimik Idayana saat bersama KH Nurul Huda Djazuli

dang-undangan.

“Harapan kami, Kemendagri bisa turun langsung ke Sidoarjo untuk memeriksa proses mutasi ini. Mutasi harus sesuai dengan UU yang berlaku,” ujar Sigit.

Meski demikian konflik antara Subandi dan Mimik segera akur lagi. “Kita pantau terus. Nggak mungkin kita nggak

memantau perkembangannya. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, Kamis (25/9/2025).

“Kita pantau, kita lihat komunikasinya seperti apa,” tambah Emil. Emil lalu berharap antara Subandi dan Mimik segera ada titik temunya. Sebab hal itu

lah yang diinginkan masyarakat Sidoarjo. “Kita berharap bisa tentunya komunikasi yang berjalan saat ini bisa ada titik temu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana terlibat konflik terbuka gara-gara mutasi ASN tanpa koordinasi. Retaknya duet ini dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan dan membuat rakyat jadi korban.

Dalam acara pelantikan, Subandi menegaskan mutasi adalah hal wajar dalam sistem birokrasi. Namun, pernyataan itu tak meredakan kekecewaan Mimik yang merasa dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Mimik bahkan berencana melaporkan Subandi ke Kemendagri. Namun, Subandi menanggapi hal ini dengan santai. (md/ruş)

Tengkes di Sidoarjo Naik Jadi 10,6 Persen

SIDOARJO - Angka tengkes (*stunting*) di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Berdasarkan Survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI), persentasenya naik dari 8,4 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen pada 2024.

Sekda Pemkab Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, ada peningkatan sebesar 2,2 persen. Dia mengatakan, kenaikan 2,2 persen ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat strategi penanganan *stunting*. "Kalau kita melihat ring satu di kabupaten sekitar kota, itu naiknya enam persen, rata-rata lainnya lima persen. Jadi meski naik tapi tidak terlalu banyak," ungkapnya kemarin (25/9).

Meski demikian, kenaikan tersebut menjadi alarm peringatan bagi Pemkab untuk segera bertindak menekan angka *stunting*. "Nantinya, ukuran kualitas SDM di daerah akan dinilai dari angka *stunting* dan kematian balita. Kami butuh inovasi untuk bisa mengentaskan ini," katanya.

Fenny mengatakan akan memperkuat dan melakukan percepatan berbagai langkah pencegahan. Mulai dari edukasi gizi bagi ibu hamil, peningkatan akses pangan sehat, hingga perbaikan layanan kesehatan balita. "Perlu kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, pertanian, dan infrastruktur dasar," jelasnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

CEGAH STUNTING: Kader posyandu mengukur berat badan dan ukuran kepala balita saat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) di Balai RW Celep Selatan bulan lalu.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA PO

LANGSUNG JADI: Staf kantor Kecamatan Gedangan Syamsul Dhuha (kanan) melayani Kukoh Tedy Prasetyo warga Gedangan yang membuat KTP di Kecamatan Gedangan kemarin (25/9).

Kecamatan Buka Layanan Cetak E-KTP sampai Malam

SIDOARJO - Layanan perekaman sekaligus cetak KTP elektronik atau e-KTP kini bisa dilakukan langsung di kantor kecamatan. Bahkan, sejumlah kecamatan membuka pelayanan jemput bola hingga malam hari untuk mempercepat pencetakan ribuan KTP yang sudah lama menumpuk.

Camat Gedangan Ineke Dwi Setiawati menyebut, Kecamatan Gedangan sudah menerima 1.500 keping blanko KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Disdukcapil) Sidoarjo. "Sejauh ini baru 86 keping yang berhasil dicetak, sehingga masih tersisa 1.414 keping," katanya.

Ineke mengatakan upaya percepatan sudah dilakukan dengan pemberitahuan melalui media sosial maupun status WA pelayanan kecamatan. Menurutnya masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa cetak KTP bisa di kantor kecamatan. "Kami juga ada program layanan keliling ke desa. Ada opsi pelayanan

hingga malam hari," katanya.

Sementara itu, Camat Taman juga melakukan hal serupa. Camat Taman Arie Prabowo mengatakan, pihaknya kembali menghadirkan program Simmamah atau layanan rekam dan cetak KTP sampai malam. "Dengan adanya layanan ini yang sebelumnya harus menunggu, sekarang bisa rekam dan langsung jadi," katanya. Arie mengatakan program tersebut akan rutin dijalankan tiap Rabu dengan turun ke desa-desa. (eza/uzi)

Jawa Pos

DELTA SIANA

Diganggu Tawon Vespa, Warga Magersari Batal Jemur Baju

SIDOARJO - Winda, warga Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, panik saat hendak menjemur pakaian pada Rabu (24/9). Ia diganggu sejumlah tawon vespa yang berterbangan. Saat menoleh ke atas, didapati sarang tawon vespa menempel di genteng teras rumahnya. Dia pun memanggil petugas damkar, urung menjemur baju.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli mengatakan, laporan dari Winda diterima sekitar pukul 08.30. "Pelapor langsung menghubungi damkar karena khawatir membahayakan penghuni rumah," jelasnya. Regu 1 Rescue Dankar Pos Kota kemudian diterjunkan ke lokasi.

Proses evakuasi berlangsung sekitar satu jam. Petugas harus menyemprot cairan pembasmi serangga dahulu ke sarang tawon sebelum bisa mengevakuasinya. "Tepat pukul 09.15, sarang tawon berhasil diamankan petugas," ujarnya. (eza/uzi)



DAMKAR BPBD SIDOARJO

AMBIL SARANG: Petugas Rescue Damkar Pos Kota Nizar menyemprot sarang tawon vespa di atap rumah warga Kelurahan Magersari, Sidoarjo, Rabu (24/9).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AHMAD REZA/JAWA POS

✓
PERCEPAT
LAYANAN:
Kamar
operasi di
RSUD Sibar
tahun ini
ditambah
satu
ruangan.

RSUD Sibar Tambah Kamar Operasi

Akhir Tahun Rampung

SIDOARJO - RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) tengah mengebut pembangunan tambahan satu kamar operasi. Proyek yang berjalan sekitar

satu setengah bulan itu, ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Alhadad mengatakan, sejak berdiri rumah sakit tersebut hanya memiliki tiga kamar operasi. Padahal, jumlah poli di RSUD Sibar

sudah bertambah menjadi 15. "Sehingga jumlah pasien juga bertambah, sehingga kebutuhan ruang operasi makin besar," ujarnya.

Menurutnya, penambahan ruang operasi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan tambahan ruang, pasien

tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan tindakan medis. "Target kami semua pekerjaan bisa selesai di akhir tahun," tegasnya. Harapannya, masyarakat wilayah Krian dan sekitarnya tak perlu jauh-jauh ke RSUD R.T. Notopuro. **(eza/uzi)**

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Angka Stunting Naik 2,2 Persen

KOTA-Angka stunting di Kabupaten Sidoarjo tahun ini mengalami kenaikan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting naik dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen atau bertambah 2,2 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengakui tren kenaikan tersebut cukup tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan dae-

rah sekitar, angka di Kota Delta masih relatif rendah.

"Kalau kita melihat kabupaten sekitar, kenaikannya ada yang sampai enam persen, rata-rata lima persen. Jadi Sidoarjo masih lebih baik," ujarnya, Kamis (25/9).

Fenny menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari upaya serius pemerintah daerah bersama berbagai pi-

hak dalam menekan angka stunting.

"Bersyukur sekali Kabupaten Sidoarjo hanya naik 2,2 persen. Aplaus untuk Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, dan seluruh jajaran yang sudah berupaya sekuat tenaga agar angka stunting bisa ditekan," tambahnya.

Ia menjelaskan, angka stunting kini menjadi indikator penting dalam pembangunan

manusia. Ke depan, ukuran tersebut akan digunakan dalam Human Capital Index (HCI) yang menggantikan Human Development Index (HDI).

"Dalam indeks pembangunan manusia yang akan diganti Human Capital Index, tolok ukurnya bukan lagi angka kematian bayi, melainkan angka kematian balita dan

● Ke Halaman 10



Angka Stunting...

angka stunting," jelasnya.

Menurutnya, perubahan indikator tersebut akan berpengaruh besar terhadap cara menilai kualitas SDM di daerah. Karena itu, angka stunting

dan kematian balita kini menjadi perhatian utama pemerintah.

"Kalau sebelumnya ukuran IPM memakai AKI, AKB, dan usia harapan hidup, nantinya diganti dengan angka kematian balita dan stunting," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dinkes Sidoarjo Ngaku Berkali-Kali Warning Rekanan Proyek RSUD Sedati Senilai Rp 51,7 Miliar, Tapi Tak Digubris



Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo mengancam tidak segan-segan bakal memutus kontrak kerja dengan PT Ardi Tekindo Perkasa, Surabaya. Ini menyusul soal keterlambatan proyek pembangunan RSUD Sedati yang menelan anggaran Rp 51,7 miliar.

Berdasarkan hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) Bupati, Dinkes, Dinas Perumahan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya (P2CKRT) di lokasi proyek kemarin, kinerja pihak kontraktor dinilai tidak maksimal. Bahkan terkesan tidak profesional. Dampaknya, progres pekerjaannya dibawah target dari tahapan skedul penyelesaian yakni dari yang seharusnya mencapai 10 persen baru dikerjakan 3 persen.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, dr Lakhmie Herawati didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Achmad Muhklis mengakui sejak awal dimulai pekerjaan pembangunan rumah sakit senilai Rp 51,7 miliar itu, pihaknya melakukan susah melaksanakan monitoring (pengawasan ketat) di lapangan. Selain itu, secara pihaknya juga secara berkala menggelar rapat kordinasi dengan tim konsultan, pengawas maupun pihak kontraktor.

"Hampir setiap hari kami rapat. Kami juga mengawasi pekerjaan di lapangan. Sepekan sekali, kami juga menggelar rapat evaluasi dengan pihak konsultan maupun kontraktor. Kita bahas progres dan rencana pekerjaan ke depannya. Termasuk soal kalau kendala di lapangan," dr Lakhmie Herawati, Rabu (24/09/2025) sore.

Lakhmie berharap pembangunan RSUD Sedati yang merupakan program prioritas Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Sidoarjo Mimik Idavana sebagai langkah strategis pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu, bisa berjalan dengan baik. Selain mengedepankan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi, pihak kontraktor dapat menyelesaikan tepat waktu sesuai yang diatur dalam kontrak kerja atas pelaksanaan proyek itu.

"Tapi yang terjadi, di lapangan kinerja pihak kontraktor berjalan lamban. Meski sudah berjalan hampir dua bulan, progresnya baru selesai 3 persen. Padahal, seharusnya mencapai 10 persen sesuai skedul tahapan



penyelesaian pekerjaan. Kondisi itu, tentu sangat kami sesalkan. Padahal kami sudah berkali-kali mengingatkan, dan meminta pihak kontraktor melalui konsultasinya agar pekerjaan dikebut agar penyelesaian progresnya tepat waktu. Tapi, seperti peringatan (warning) itu diabaikan," tegas Lakhmie yang baru dilantik menjadi Sekretaris Dinkes Pemkab Sidoarjo ini.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terakhir pihak kontraktor mempermasalahkan uang muka atas pekerjaan yang belum dibayar sebagai alasan lambannya pekerjaan. Padahal, kata Lakhmie berdasarkan klausul kontrak kerja, sama sekali tidak mengatur adanya pembayaran uang muka.

"Yang diatur adalah pembayaran per termin saja. Untuk termin pertama dibayar setelah progres pekerjaan selesai mencapai 20 persen dengan besaran nilai yang dibayar 10 persen," tandasnya.

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Muhklis mengaku bakal segera menggelar Show Cause Meeting (SCM), untuk meminta penjelasan kepada PT Ardi Tekindo Perkasa, Surabaya atas keterlambatan pekerjaan itu. Termasuk membahas soal hambatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengejar keterlambatan progres pekerjaan itu.

"Kami sudah melayangkan surat teguran kepada rekanan pada 18 September kemarin. Dalam surat itu, kami minta agar pihak kontraktor bekerja sesuai kontrak kerja. Kami tidak ingin ada keterlambatan lagi ke depannya," pintanya.

Sementara ditanya soal langkah yang kemungkinan dilakukan untuk rekanan semisal kinerjanya tidak membaik, apa akan ada pemutusan kontrak kerja, dr Lakhmie maupun Muhklis menegaskan jika terbukti pihak kontraktor wan prestasi, pihaknya tidak segan-segan mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (kontrak) sebagai upaya mengakhiri kerjasama.

"Tentunya, untuk memutus kerjasama ini ada peraturan dan mekanismenya. Misalnya sudah di-SP ke tiga kali, tapi pihak kontraktor tetap mengabaikan. Bisa saja kita putus kontraknya karena wan prestasinya itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, keterlambatan pembangunan RSUD Sedati sempat memantik perhatian Bupati Sidoarjo, Subandi. Saat sidak ke lokasi proyek kemarin, Subandi menvesalkan progres pekerjaan proyek itu dinilai lambat. Bahkan, menuniukkan indikasi rekanan tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Lebih ironi lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan PT Ardi Tekindo Perkasa tercatat badan usaha yang masuk dalam daftar hitam, yang berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2025.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, semestinya dengan status blacklist (daftar hitam) ini, perusahaan ini dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian dan atau Lembaga/Perangkat Daerah/ institusi lainnya dengan jangka waktu yang ditetapkan. Ary/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Punya Markas Baru, Kini DPD PAN Sidoarjo Berkantor di Perum Taman Pinang Indah Kota Delta



Sidoarjo (republikjatim.com) - Para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo kini memiliki kantor sekretariat baru. Saat ini, para pengurus dan kader bergambar matahari itu, bakal selalu berkantor dan bermarkas di Blok E 1, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) pusat Kota Delta.

Kantor baru itu, memiliki luas sekitar 350 meter persegi. Bangunannya juga berlantai dua. Kantor baru ini dinilai cukup mentereng dengan simbol gambar partai yang terlihat sangat mencolok.

Dalam peresmian Kantor DPD PAN Sidoarjo yang baru ini, diresmikan secara khidmat dengan tasyakuran sederhana, Rabu (24/09/2025) malam. Hadir dalam tasyakuran itu, seluruh jajaran pimpinan DPD PAN Sidoarjo, DPC PAN se Sidoarjo, Perempuan Amanat Nasional serta jajaran pengurus Simpatik PAN.

Dalam pembukaan kantor baru itu, sambutan awal dibuka Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, Bangun Winarso. Politisi asal Krian ini, berharap dengan Kantor DPD PAN Sidoarjo baru ini, ke depannya PAN Sidoarjo akan semakin cemerlang.

"Terutama dalam upaya menampung dan merealisasikan semua aspirasi warga Sidoarjo," ujar Bangun Winarso.

Dinkes Sidoarjo Ngaku Berkali-Kali Warning Rekanan Provek RSUD Sedati Senilai Rp 51,7 Miliar, Tapi Tak Digubris

Sambutan kedua disampaikan Bendera DPD PAN Sidoarjo, Haris. Menurut mantan anggota DPRD Sidoarjo ini, dengan kantor baru pihaknya berharap bakal menambah spirit para kader PAN Sidoarjo untuk membesarkan partai bergambar matahari itu.

"Mari semua semangat membesarkan nama partai dan perolehan suara di wilayah Sidoarjo," pintanya.

Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten Sidoarjo, Dr Emir Firdaus memberikan arahan terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN Sidoarjo yang kemungkinan digelar bulan Oktober 2025 mendatang. Dalam Musda itu, lanjut Emir, bakal dipilih pimpinan daerah baru oleh DPP PAN.

"Semoga, pimpinan yang baru ke depan tidak jauh dari yang datang pada acara tasvakan malam hari ini," tegas Emir Firdaus.

Selain itu, Emir Firdaus juga mendoakan, agar cita-cita partainya yang belum tercapai, bisa segera tercapai. Salah satunya, mengembalikan perolehan kursi PAN di Pemilu mendatang. Apalagi, saat ini kursi di DPRD Sidoarjo berkurang satu kursi.

"Secara perolehan suara di dalam Pemilu Tahun 2024 kemarin, PAN masuk dalam kategori empat besar berdasarkan perolehan suara, meskipun dalam perolehan kursinya berkurang. Kita berdoa dan bekerja keras, agar perolehan kursi legislatif kembali bertambah lagi minimal lima kursi untuk PAN Sidoarjo," pungkasnya. Arc/Waw.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SOAL PEMBANGUNAN RSUD SEDATI: Tidak Profesional, PT ATP Terancam Diputus Kontrak Dinkes Sidoarjo

"Alasan kontraktor karena uang muka belum dibayar. Padahal klausul kontrak kerja mengatur pembayaran per termin sesuai progres pekerjaan. Bukan uang muka," kata dr Lakhmie Herawati, Plt Kepala Dinkes Sidoarjo.



NUSADAILY.COM – SIDOARJO: Soal lambannya pekerjaan pembangunan RSUD Sedati, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo tidak segan-segan memutuskan kontrak kerja dengan PT Ardi Tekindo Perkara. Seiauh ini kinerja pihak kontraktor dinilai tidak maksimal, bahkan terkesan tidak profesional sehingga progres pekerjaannya dibawah target dari tahapan skedul penyelesaian di lapangan.

Plt Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lakhmie Herawati didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Achmad Muhklis mengaku sejak awal dimulai pekerjaan pembangunan rumah sakit senilai Rp 51,7 miliar ini, pihaknya melakukan monitoring (pengawasan ketat) di lapangan. Selain itu secara berkala mengadakan rapat koordinasi dengan tim konsultan pengawas maupun pihak kontraktor.

"Hampir setiap hari kami rapat, selain juga mengawasi pekerjaan di lapangan. Dan sepekan sekali kami juga mengadakan rapat evaluasi dengan pihak konsultan maupun kontraktornya. Kita bahas progresnya, dan rencana pekerjaan ke depannya, berikut bila ada kendala di lapangan" kata dr Lakhmie, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (24/9/2025) sore.

Pihaknya berharap pembangunan RSUD Sedati yang merupakan program prioritas Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idavana sebagai langkah strategis pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Selain mengedepankan kualitas sesuai spesifikasi, pihak kontraktor dapat menvelesaikan tepat waktu, seperti diatur dalam kontrak kerja atas pelaksanaan proyek tersebut.

Namun yang terjadi, lanjut dia, kinerja pihak kontraktor berjalan lamban. Meski sudah berjalan hampir dua bulan, progresnya baru 3 persen. Padahal semestinya, sesuai skedul tahapan penyelesaian minimal mencapai 10 persen. "Kondisi ini tentunya sangat kami sesalkan. Padahal kami sudah berkali-kali mengingatkan, dan meminta pihak kontraktor melalui konsultasinya agar pekerjaan disebut sehingga penyelesaian progresnya tepat waktu. Namun rupanya itu diabaikan," tegas dr Lakhmie



Rapat koordinasi terakhir pihak kontraktor mempermasalahkan uang muka atas pekerjaan itu yang belum dibayar sebagai alasan lambannya pekerjaan. Padahal berdasarkan klausul kontrak kerja, sama sekali tidak mengatur adanya pembayaran uang muka. Yang diatur adalah pembayaran pertermin, dan untuk termin pertama dibayar setelah progres pekerjaan selesai 20 persen, dibayar 10 persen.

Menyikapi persoalan ini, pihaknya melalui PPKom, segera mengadakan Show Cause Meeting (SCM), untuk meminta penjelasan kepada PT ATP atas keterlambatan pekerjaannya. Berikut pula membahas hambatan, dan langkah perlu diambil untuk mengejar keterlambatan progres pekerjaan tersebut.

Pihaknya juga sudah melayangkan surat teguran kepada PT ATP, pada 18 September lalu. "Dalam surat itu kami minta agar pihak kontraktor bekerja sesuai kontrak kerja. Kami tidak ingin ada keterlambatan lagi ke depannya," tegasnya.

Apa mungkin dilakukan pemutusan kontrak kerja, dr Lakhmie maupun Muhklis menegaskan bila terbukti pihak kontraktor wan prestasi, pihaknya tidak segan-segan mengambil keputusan tersebut --mengakhiri kerjasama. "Tentunya untuk memutus kerjasama ini ada aturan dan mekanismenya. Misalnya sudah di-SP ke tiga kali, namun pihak kontraktor tetap mengabaikan. Jadi bisa saja kita putus kontraknya karena wan prestasi," tegasnya.

Seperti diketahui, keterlambatan pembangunan RSUD Sedati, yang merupakan wilayah Sidoarjo utara ini juga sempat memantik perhatian Bupati Subandi. Saat sidang Bupati Subandi menyesalkan progresnya relatif lamban. Bahkan menunjukkan indikasi PT ATP tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Ironisnya lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyebutkan PT Ardi Tekindo Perkasa, tercatat badan usaha yang masuk dalam daftar hitam, yang berlaku pada 26/08/2025.]

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, semestinya dengan status blacklist ini, PT ATP dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian dan atau Lembaga/Perangkat Daerah/instistusi lainnya dengan jangka waktu yang ditetapkan. (*/cak ful)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIMMAMAH Kecamatan Taman, servis ke Masyarakat diluar jam kerja, Camat : Percepat Layanan Sekaligus Aksi Perubahan



Sidoarjo, Cakrawala.co — Kecamatan Taman, Sidoarjo, kembali melaksanakan program SIMMAMAH atau siap melayani masyarakat malam hari.

Inovasi layanan publik diluar jam kerja ini memudahkan masyarakat yang mau mengurus administrasi atau dokumen kependudukan.

Pada Rabu, 24 September 2025 malam, SIMMAMAH Kecamatan Taman hadir di Kantor desa Tawang Sari, memberikan pelayanan kepada warga setempat.

Camat Taman Arie Prabowo, S.STP, M.PSDM menyampaikan bahwa hadirnya lagi SIMMAMAH menyusul adanya 1.500 keping blanko KTP yang diterima kecamatan Taman.

"Jadi ini untuk percepatan layanan sekaligus aksi perubahan. Artinya, yang sebelumnya gak bisa langsung jadi, sekarang bisa langsung jadi," ucapnya.

Menurut Camat Arie, SIMMAMAH diadwalkan seminggu sekali, tepatnya tiap hari Rabu ke desa-desa atau kelurahan yang ada wilayah Kecamatan Taman.

"Nantinya keliling, dan blanko menyesuaikan. Sedangkan pelayanan yang diberikan meliputi KTP baru, KTP hilang, rusak, KIA dan lain-lain," pungkas Camat yang akrab disapa Kotrix ini.

Sementara itu Kepala desa (Kades) Tawang Sari Adi Sucioto, SH dalam kegiatan tersebut menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo, kepada Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo.

"Warga antusias jemput bola ini bisa dimanfaatkan warga dalam melakukan kepengurusan adminduk dengan akses lebih cepat," kata Kades Tawang Sari.

Salah satu warga bernama Singgih mengaku mengurus KTP-nya yang sudah rusak. "pelayanan cepat mas, tadi saya datang pukul 18.00 WIB, dan gak sampai sejam sudah jadi," singkatnya kepada jurnalis Cakrawala.co.